Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 12 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 31 / 1-4
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : PATTIRADJAWANE, RENE L.
No_Klass/Subjek : 004 / TEKNOLOGI KOMPUTER

Piala Dunia dan Teknol[illegible]

Persaingan Komputer dan Komentator

HAMPIR tidak ada yang bisa memastikan kalau kesebelasan Perancis, juara Piala Dunia 1998, secara dramatis dikalahkan bekas koloninya sendiri, kesebelasan Senegal, 1-0, pada hari pertama pembukaan Piala Dunia 2002. Tetapi, ternyata, sebuah komputer yang disebut GARI secara meyakinkan bisa memperkirakan kalau Senegal memiliki kemungkinan memenangi pertandingan dalam persentase yang lebih besar melawan Perancis pekan lalu.

MENGGUNAKAN komputer PC atau perangkat komputasi lain yang menggunakan prosesor dengan kecerdasan artifisial memang menjadi sebuah fenomena baru dalam Piala Dunia 2002. Tujuannya sendiri memang bukan untuk menentukan jalannya pertandingan sepak bola yang berlangsung di Korea Selatan dan Jepang, tetapi lebih pada tujuan untuk meramaikan Piala Dunia 2002 itu sendiri.

Perkiraan jalannya pertandingan Piala Dunia 2002 ini memang disponsori oleh stasiun radio *BBC Radio Five* (http://www.bbc.co.uk/fivelive/worldcup/fun/chris_lawro.shtml#groupgames). Seorang ahli matematika Henry Stott di Universitas Warwick, Inggris, mengembangkan GARI (*Glover Automated Result Indicator*), sebuah model statistik yang dirancang menggunakan komputer PC untuk melihat probabilitas masing-masing pertandingan dalam Piala Dunia 2002 ini.

Hasil yang dicapai GARI sendiri, menurut Henry Stott, memang berhasil mengungguli para bandar perjudian, baik yang dilakukan melalui jaringan Internet maupun *off-line*, serta perkiraan para komentator dan analis televisi yang sekarang penuh dengan acara yang berkaitan dengan Piala Dunia 2002. Stott mengatakan, model statistik rancangannya mampu mengungguli para bandar, baik diukur berdasarkan fungsi kemungkinan probabilitas maupun hasil taruhan secara langsung.

◆◆◆

MENURUT majalah *Wired* (http://www.wired.com), model GARI sendiri terdiri dari dua dimensi. Dimensi pertama diukur berdasarkan "kekuatan" yang melakukan kuantifikasi bagaimana masing-masing kesebelasan saling berhadapan. Dan, dimensi kedua adalah apa yang disebut "ketidakaturan" yang menggambarkan ketidakpastian kesebelasan yang bertanding.

Meskipun Perancis berada pada *ranking* di atas kesebelasan Brasil dilihat dari dimensi kekuatan pada rancangan GARI ini, tetapi posisinya sendiri berada di bawah Brasil dilihat dari probabilitas untuk memenangi Piala Dunia 2002 karena tingginya dimensi ketidakaturan kesebelasan juara Piala Dunia 1998 ini. Model GARI memang cenderung untuk menekankan kekuatan kesebelasan "underdog" ketimbang mengungguli kekuatan masing-masing kesebelasan.

Ini yang menjelaskan kenapa GARI bisa memilih Senegal sebagai pemenang dalam pertandingan Perancis, dan bertolak belakang dengan para bandar yang meremehkan kesebelasan "underdog" dan menjagokan sang juara bertahan. Stott sendiri menyebutkan bahwa ini memang tidak mengherankan karena kemungkinan dalam perjudian selalu diwakili dengan uang dan tidak mencerminkan apa yang dipercayai oleh para bandar judi.

Dengan menggunakan model linear dasar, GARI mengumpulkan data dari 900 pertandingan kualifikasi dan persahabatan menjelang dimulainya Piala Dunia 2002. Model yang digunakan mengikuti metoda yang sama dengan teknik yang umum dipakai para bankir untuk menilai risiko keuangan. Model ini termasuk apa yang disebut sebagai simulasi "Monte Carlo" yang menyimulasi ratusan ribu pertandingan virtual untuk memperkirakan kemungkinan masing-masing tim guna memenangi keseluruhan pertandingan.

Berdasarkan data ini, GARI memperkirakan kesebelasan Argentina sekarang ini menjadi favorit pada posisi 16 persen untuk memenangi Piala Dunia 2002.

◆◆◆

MODEL statistik lainnya juga diciptakan oleh Peter O'Donoghue, seorang pengajar olahraga di Universitas Ulster (Inggris), yang memperkirakan kalau

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

kesebelasan Brasil yang akan memenangi Piala Dunia 2002.

Seperti halnya dalam model GARI, O'Donoghue juga menggunakan komputer untuk melakukan simulasi Piala Dunia 2002 ini berdasarkan *ranking* FIFA, jarak yang harus ditempuh untuk bertanding, waktu pemulihan antarpertandingan, serta dampak bagi sebuah kesebelasan yang harus berpindah-pindah antara Jepang dan Korsel untuk bertanding (http://www.ulst.ac.uk/news/releases/2002/500.html).

Komputer O'Donoghue menyimulasi turnamen sebanyak 2.000 kali dengan hasil Brasil menang 24,8 persen dari turnamen yang dipertandingkan.

Berbeda dengan GARI, pada akhir simulasi pertandingan O'Donoghue membandingkan kalkulasi komputer PC dengan prakiraan sekelompok pecandu sepak bola untuk mengetahui apakah komputer bisa melakukan prediksi lebih baik dibanding manusia.

Komputer memang mampu melakukan kinerja yang dalam dan rumit, serta mengungguli kemampuan manusia, dengan melakukan simulasi ribuan variasi untuk mengacak kemungkinan-kemungkinan bagaimana turnamen Piala Dunia 2002 ini berkembang. Persoalannya, sebuah komputer tidak akan bisa mengerti dampak yang diakibatkan dengan dikirim pulangnya kapten kesebelasan Irlandia atau cedera yang dialami oleh pemainan utama.

Dan faktor ini yang dengan cepat dimengerti dan diintegrasikan oleh para komentator dalam menganalisis jalannya pertandingan. Mungkin butuh waktu yang cukup lama bagi komputer untuk menyaingi kemampuan para komentator sepak bola sekarang ini.

RENE L PATTIRADJAWANE
dari Hongkong

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 7 / FEBRUARI / 2003
Hlm/Kolom : 30 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KOMPUTER / 004

Teknologi Hyperthreading

Dua Prosesor untuk Mencari Kecepatan Maksimum

KETIKA Intel Corp meluncurkan sebuah produk barunya Pentium 4/3,06 GHz menggunakan teknologi *Hyperthreading*, maka jelas dominasi prosesor dunia masih tetap berada pada Intel dengan meninggalkan saingannya, AMD, yang memang menghadapi tidak hanya pada persoalan teknologi saja tapi juga pemasarannya yang tidak mencntu sekarang ini. Salah satu keunggulan Intel adalah dukungan yang sangat kuat pada riset dan pengembangan, serta dukungan teknologi chipset, yang memang memegang peranan penting untuk mendukung kinerja optimal prosesor.

KEHADIRAN Pentium 4 dengan kecepatan 3,06 GHz sekaligus menegaskan kembali keunggulan Intel Corp dalam persaingannya dengan AMD.

Memang masih menjadi pertanyaan bagi para pengguna awam, kecepatan prosesor yang disediakan Intel akan digunakan untuk mengerjakan aplikasi jenis apa, atau permainan komputer PC mana yang membutuhkan prosesor tercepat di dunia ini?Ini memang menjadi pertanyaan yang menarik untuk dicarikan sebuah penjelasan yang memadai guna bisa memaksimalkan penggunaan Pentium 4/3,06 GHz tersebut.

Ketika *Kompas* pertama kali menggunakan Pentium terbaru Intel ini, memang terasa sekali adanya kesenjangan aplikasi, jenis apa yang kira-kira memadai untuk digunakan dengan memanfaatkan keunggulan kinerja Pentium 4/3,06 GHz.

Apalagi kalau dipertimbangkan, harga prosesor terbaru Intel ini dijual dengan harga dua kali lebih mahal dibanding prosesor Pentium 4/2,8 GHz.Teknologi *hyperthreading* sendiri dalam pengembangan prosesor Intel bukan lah sesuatu yang baru. Teknologi ini pertama kali digunakan pada prosesor Xeon yang lazim digunakan pada komputer server untuk menjalankan berbagai ragam aplikasi yang berat dan besar. Kenapa Intel menurunkan teknologi ini untuk digunakan pada tingkat konsumen memang memang masih menjadi tanda tanya.

Namun, sesuatu bisa dipastikan kalau kita secara cermat memperhatikan perkembangan Intel Corp, yang juga terjadi pada perusahaan-perusahaan teknologi komunikasi informasi yang berskala dunia.

Produsen prosesor terbesar di dunia ini ingin mendorong teknologi yang dikembangkan dan ditemukannya untuk memungkinkan pengejawantahan kinerja-kinerja utama baik pada prosesornya sendiri maupun chipset buatannya dengan menduduki posisi terdepan dalam industri komputer secara keseluruhan.Teknologi *hyperthreading* sebenarnya merupakan sebuah metode baru untuk menata kinerja prosesor dan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penggunaan dua prosesor secara virtual dengan hanya menggunakan sebuah prosesor Pentium 4. Kemampuan semu seolah-olah komputer PC yang kita gunakan berjalan menggunakan dua prosesor ini memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja dalam berbagai aplikasi yang dioptimalkan untuk penggunaan prosesor ganda.

Pemanfaatan teknologi *hyperthreading* ini memungkinkan seluruh kinerja sistem komputer PC yang kita gunakan menjalankan sebuah lingkungan tugas ganda (*multitasking*) karena prosesor semu yang terintegrasi dalam teknologi *hyperthreading* ini bisa memproses berbagai tugas di mana sebenarnya prosesor utamanya sendiri menjalankan fungsi yang lain. Kenyataan ini menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja 5 sampai 7 persen tergantung dari aplikasi perangkat lunak yang digunakan serta kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi ini.

Ketika *Kompas* pertama kali menggunakan teknologi *hyperthreading* pada prosesor Pentium 4 terbaru buatan Intel ini, memang tidak terasa perbedaan yang signifikan dibanding dengan prosesor Pentium sebelumnya, bahkan sampai dengan yang berkecepatan 2,26 GHz sekali pun. Ini disebabkan karena memang teknologi *hyperthreading* dimaksudkan untuk mendorong percepatan pada penggunaan aplikasi yang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

digunakan.

Sehingga teknologi *hyperthreading* dalam Pentiun 4 ini baru terasa ketika kita menggunakan aplikasi berat seperti aplikasi grafis maupun aplikasi perkantoran yang berat. Kondisi kinerja teknologi *hyperthreading* baru terasa ketika *Kompas* menggunakan aplikasi pemrosesan foto Adobe Photoshop dan mencoba membuka 20 buah foto digital yang rata-rata besarnya 4 MB hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit saja.

Kondisi prosesor *hyperthreading* sendiri baru mencapai titik optimum sekitar 70 persen saja, bandingkan dengan penggunaan aplikasi biasa seperti browser untuk berselancar di jaringan Internet atau program aplikasi Office buatan Microsoft untuk menulis artikel ini yang hanya menempatkan prosesor pada titik optimum mencapai 15-20 persen saja.

prosesor

Ketika Intel meluncurkan prosesor Pentium 4 yang mampu menembus batas kecepatan 2 GHz pada 27 Agustus 2001, tanggal tersebut menjadi sebuah era penentuan dalam industri komputasi di mana prosesor x86 mampu mencapai kecepatan tersebut. Padahal, persaingan untuk mencapai kecepatan 1 GHz membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan persaingan dari kecepatan 1 GHz mencapai 2 GHz dibutuhkan waktu kurang dari 12 bulan.

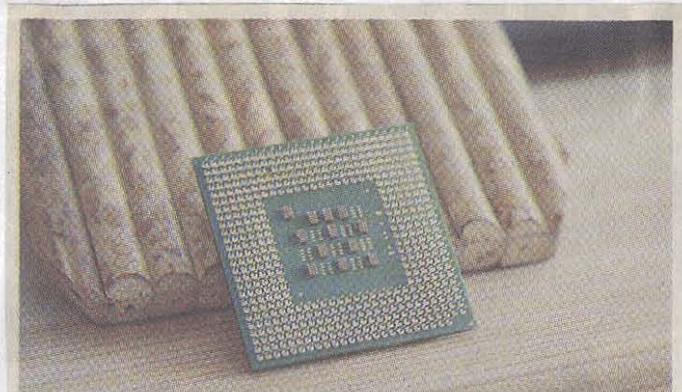
Sekali lagi, Intel membuktikan bahwa untuk mencapai percepatan 1.000 MHz juga dibutuhkan sekitar 12 bulan, di mana tidak hanya masalah percepatan kalkulasi komputasi saja yang bertambah, tapi juga kemampuan untuk mengembangkan dan memperdalam kinerja prosesor seukuran perangko ini untuk mengantisipasi semakin luasnya digitalisasi sekarang ini.

Teknologi *hyperthreading* yang sebelumnya hanya digunakan untuk konsumen pada tingkat perusahaan ini sebenarnya merupakan sebuah perluasan dari *superthreading* sebuah konsep yang sudah ada dalam dunia prosesor dan telah diejawantahkan dalam berbagai tampilan beberapa tahun terakhir ini. Salah satu kendala utama pada prosesor Pentium 4/3,06 GHz, seperti yang sering terjadi pada prosesor-prosesor Intel terbaru, adalah harga jualnya sendiri yang bisa mencapai lebih dari 600 dollar AS.

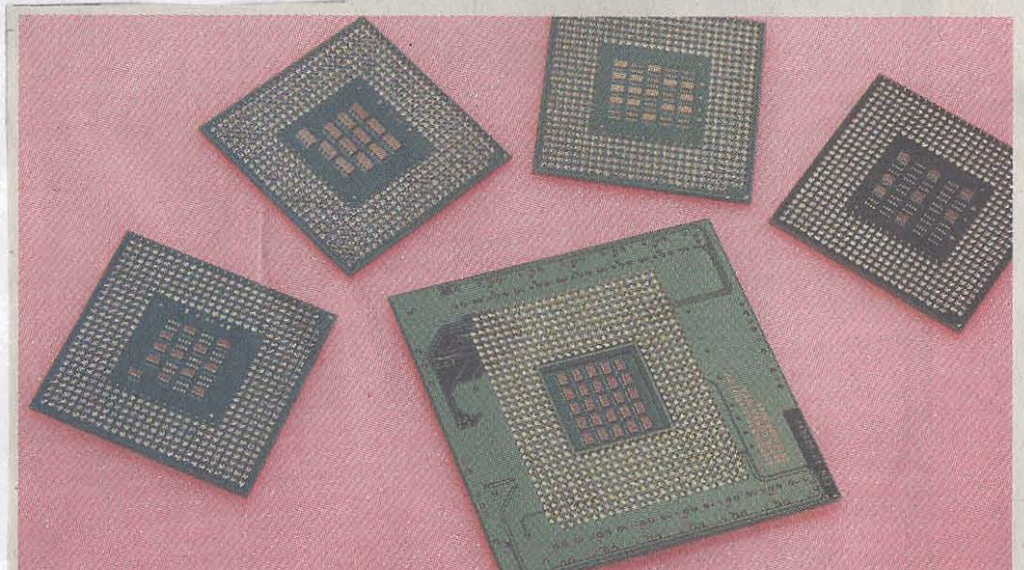
Sementara prosesor yang berada di bawahnya dengan kecepatan 2 8 GHz dijual dengan harga setengahnya. Bagi sebagian konsumen awam, derajat skala kinerja prosesor sendiri menjadi tidak cukup untuk memiliki prosesor x86 yang tercepat di dunia sekarang ini. Karena, bagaimana pun juga untuk mencapai titik optimal pemanfaatan teknologi *hyperthreading*, akan sangat tergantung dari campuran dan penggunaan aplikasi yang digunakan.

Tapi di sisi lain, penggunaan dua prosesor dalam sekeping Pentium 4/3,06 GHz adalah sebuah terobosan penting dalam mengantisipasi perkembangan pesat digitalisasi dan multimedia sekarang ini. Semakin besarnya data-data digital, seperti pada foto-foto digital misalnya, akan memberikan nuansa pemanfaatn dan penggunaan komputer PC yang berbeda dengan menggunakan sebuah prosesor. Karena dua prosesor sudah pasti mampu memberikan kecepatan maksimum. (RLP)

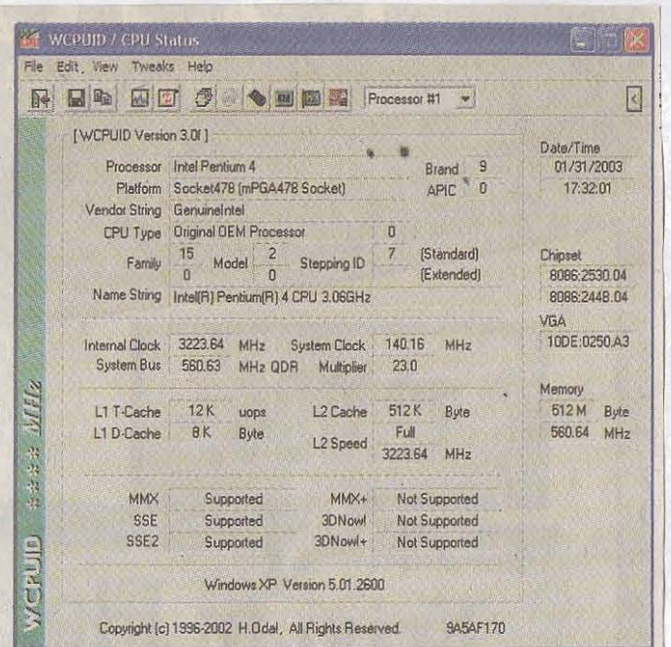
Perpustakaan Unikom



KOMPAS/RENE L. PATTIRADJAWANE



KOMPAS/RENE L. PATTIRADJAWANE



KOMPAS/RENE L. PATTIRADJAWANE

Perkembangan Prosesor — *Mengikuti Hukum Moore yang menyebutkan penambahan kecepatan prosesor setiap 6 bulan, Intel Corp yang selama ini menguasai pasaran prosesor terus mengembangkan produknya dengan memperkenalkan Pentium 4/3,06 GHz Hyper-threading (atas kiri) yang menjadikan sebuah komputer PC seolah bekerja menggunakan dua prosesor (atas). Pentium 4/3,06 GHz adalah produk terbaru yang menggantikan kedudukan prosesor-prosesor sebelumnya, yang bermunculan pada tahun 2002, mulai dari Pentium 4/2,8 GHz, 2,5 GHz, 2,26 GHz, dan prosesor Xeon 2 GHz (kiri).*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....
.....

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 40 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : PATTIRASAWANE, REDE L
Subjek : KOMPUTER (TEKNIK) - KOMPONEN-KOMPUTER -
PERKEMBANGAN PC / 004 3

Beralihnya Penguasa Komputer PC ke Prosesor Grafik

KALAU Intel Corp maupun Microsoft tidak berkarya selama 20 tahun terakhir ini dan telah menghasilkan satu milyar komputer PC di seluruh dunia sekarang ini, mungkin kita tidak akan mengenal apa yang disebut sebagai akses jaringan Internet maupun multimedia yang sekarang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

SEKARANG, perkembangan *mikrocip* sudah begitu pesatnya dan mengubah jalannya dunia menuju ke sebuah bentuk yang sama sekali baru dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah inovasi teknologi.

Di luar kedua perusahaan ini, perusahaan lain yang juga ikut menentukan perubahan teknologi komunikasi informasi adalah nVidia yang didirikan pada tahun 1993 yang tahun lalu mencapai penjualan 1,4 milyar dollar AS.

Perusahaan AS yang didirikan oleh Jen-Hsun Huang asal Taiwan ini memang berhasil mendominasi pasaran unit pemrosesan grafik *(Graphics Processing Units* atau GPU) dan menurut majalah *Wired* edisi 10 Juli 2002 perusahaan ini mampu menempatkan diri menjadi apa yang disebut sebagai bagian grafik dari prosesor Intel.

Perusahaan nVidia akhir-akhir ini memang menjadi sebuah kecenderungan yang menarik untuk disimak di tengah melesunya perkembangan bisnis teknologi komunikasi informasi akhir-akhir. Apalagi, pemain-pemain besar teknologi komunikasi informasi ini mengalami stagnasi yang berkepanjangan, mungkin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akan dimulainya sebuah resesi dunia yang bakal panjang atau memang terjadi kejenuhan yang memuncak setelah tidak ada lagi terobosan penting untuk menghasilkan *killer application* di tengah-tengah merebaknya dan meluasnya peranan dan fungsi multimedia sekarang ini.

Lihat saja perkembangan terakhir dilihat dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak, yang muncul di tengah-tengah kita adalah sebuah bentuk kampanye pemasaran besar-besaran ketimbang menghasilkan teknologi yang signifikan. Penghasil prosesor terbesar di dunia, Intel Corp, misalnya, terus sibuk untuk mengembangkan prosesor dengan berbagai macam kecepatan komputasi yang notabene tidak memberikan arti yang banyak bagi kehidupan orang banyak. Atau Microsoft Corp dengan Windows XP yang ternyata tidak disertai dengan migrasi besar-besaran pengguna komputer PC berbasis Wintel (menggunakan sistem operasi Windows dan prosesor Intel) ke sistem operasi yang baru ini.

Fenomena yang menarik sebenarnya muncul belakangan ketika orang-orang mulai melirik ke sistem operasi yang terbuka seperti Linux. Raksasa lainnya, Hewlett-Packard, misalnya, setelah membeli Compaq belum lama ini mulai memperkenalkan sistem komputer PC berbasis Linux ketika meluncurkan komputer PC Compaq Evo dengan sistem operasi RedHat.

Prosesor grafik

Di sisi lain, kita melihat berbagai macam ragam perangkat-perangkat tambahan (peripheral) yang bermunculan, khususnya dalam upaya untuk memperbaiki tampilan di layar monitor. Dan, peranan ini secara cermat dan pasti, mulai dikendalikan oleh nVidia yang dalam empat tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan 100 persen setiap tahunnya, menjadikan perusahaan yang didirikan oleh Huang Jen-hsun pria asal Taiwan ini sebagai perusahaan pembuatn unit pemrosesan grafik terbesar di dunia.

Produk yang disebuat sebagai GPU *(Graphic Processing Unit)* ini, merupakan perusahaan semikonduktor yang memacu *video game* dalam tampilan yang sangat realistis, gambar 3D, dan mencangkokkan *video* ke dalam PC. Menurut majalah *Wired* edisi bulan lalu, mencapai penjualan sebesar 1,4 milyar dollar AS dan mengungguli saingannya ATI Technologies yang merugi sebesar 54 juta dollar AS.

Produk GPU buatan nVidia ini pun terus mendorong kekuatannya sampai pada penggunaan prosesor grafik *high-end* dengan membiarkan teknologi menetes ke bawah sampai pada titik harga penjualan yang murah sehingga terjangkau oleh siapa saja. Dan, nVidia akhirnya mencapai sebuah tingkatan yang setara dengan Intel dalam seluruh sistem kesatuan komputer PC sekarang ini.

Memang kalau disimak secara cermat, peranan prosesor grafik menjadi semakin penting dalam era multimedia sekarang ini. Intel yang selama ini mendominasi struktur komputer PC memang seolah-olah memberikan restu kepada prosesor grafik, karena memang chip grafik sekarang ini membantu dan mendongkrak penjualan komputer PC secara keseluruhan.

Namun demikian, secara sepintas kita mulai melihat adanya tantangan baru yang akan dihadapi Intel yang selama ini memegang peranan penting dalam penguasaan isi komputer PC. Gejalanya mulai tampak tahun ini ketika nVidia bermitra dengan saingan Intel, Advance Micro Drive (AMD) untuk mengembangkan chip nForce, sebuah chipset yang terintegrasi untuk menangani berbagai tugas dan fungsi multimedia, se-

perti misalnya memutar DVD dengan kualitas layar lebar di perangkat komputer.

Mengecil

Para eksekutif nVidia pun sudah mulai bercita-cita untuk menjadikan perusahaan mereka lebih besar dibanding Intel. Didukung oleh berbagai perusahaan di Taiwan, seperti Asus dan Leadtek yang sekarang menguasai pasaran penjualan *video card* dunia, mungkin cita-cita ini menjadi masuk akal. Coba saja perhatikan. Seluruh proses multimedia sekarang ini memang lebih banyak ditangani oleh prosesor grafik buatan nVidia ketimbang prosesor Intel.

Pemahaman ini sebenarnya berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan kemajuan teknologi semikonduktor sendiri. Sebuah komputer PC menggunakan CPU *(Central Processing Unit)* atau prosesor (yang buatan Intel) untuk menerjemahkan instruksi yang diberikan perangkat lunak serta perhitungan data secara intensif. Contoh yang paling mudah adalah penggunaan PowerPoint untuk presentasi dan Excel untuk melakukan berbagai perhitungan.

Adapun untuk tugas-tugas sampingan, seperti pemrosesan audio atau konektivitas jaringan kerja melalui Ethernet, prosesor melepaskan "tanggung jawab"-nya kepada prosesor-prosesor khusus. Mereka yang mengembangkan prosesor khusus ini, dalam bahasa teknisnya disebut sebagai chipset, berhasil mengembangkannya dengan penambahan berbagai transistor yang menjadikan chipset semakin bertenaga (powerful) yang kemudian menjadi piawai dalam menjalankan berbagai fungsinya.

Yang menarik adalah perkembangan chipset ini pun kemudian juga ikut mengecil, kira-kira seukuran prangko, dan berbagai fungsionalitasnya pun kemudian masuk ke dalam prosesor utama (CPU) atau prosesor semikonduktor lainnya. Sehingga, perkembangan ini memang menjadi kenyataan yang menyakitkan bagi perusahaan seperti Creative Labs yang mengembangkan berbagai jenis perangkat suara *(soundcard)*. Sepertinya, Creative pun akhirnya harus rela melepaskan sebagian kemampuannya diambil oleh perusahaan yang bergerak dalam pengembangan chipset ini.

Siklus ini yang terus berjalan dan menjadi pemberi "jasa" tambahan bagi Intel sebagai penguasa komputer PC dengan CPU. Chipset khusus yang tadinya dikembangkan sebagai penunjang prosesor Intel ini pun akhirnya mengalami berbagai modifikasi, dan "penguasa" komputer PC memang masih tetap bisa bertahan karena tenaga kecepatannya maupun kekenyalan dan kegunaannya selama ini.

Kehilangan peranan

Namun demikian, keadaan ini mulai berubah ketika multimedia pertama kali dikenalkan dan berkembang dengan pesat bersamaan perkembangan jaringan Internet dan teknologi komunikasi informasi lainnya. Penggunaan prosesor grafik menunjukkan lebih efisien ketimbang penggunaan proses CPU yang selama ini didominasi oleh Intel.

Ambil saja prosesor grafik GeForce terbaru buatan nVidia yang memiliki 120 juta transistor, sebuah jumlah yang lebih besar ketimbang yang ada pada prosesor Intel Pentium 4. Memang, chip khusus seperti GeForce ini tidak akan tertelan oleh CPU, walaupun Intel sendiri sudah lama merencanakan untuk mencangkokkan audio dan video ke dalam CPU. Namun, dalam bayangan kita, yang terjadi mungkin sebaliknya peran-peran yang selama ini dilakukan oleh CPU diambil alih oleh chipset seperti buatan nVidia ini.

Alasannya sederhana saja. Kita semua pasti tidak membutuhkan sebuah tenaga komputasi berkecepatan 2 GHz untuk menjalankan program seperti Excel atau Word untuk menulis surat. Dan, fenomena yang paling menarik dari perubahan dinamis antara GPU dan CPU sekarang ini sebenarnya muncul pada konsol *video game* Xbox buatan Microsoft.

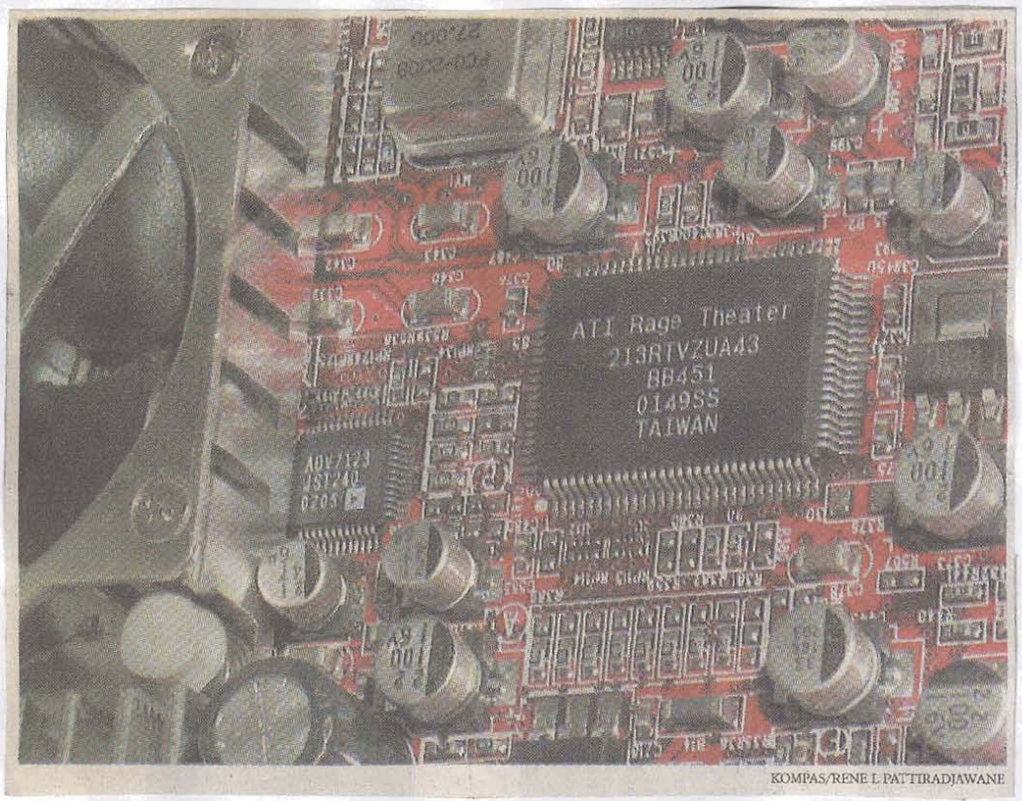
Perangkat Xbox yang menjadi kebanggan Bill Gates ini menggunakan sebuah chipset khusus nForce buatan nVidia yang menggunakan arsitektur GeForce3 untuk menangani pemrosesan grafik dan suara. Dan, yang paling menarik, Microsoft dalam mengembangkan Xbox ini membayar nVidia lebih banyak ketimbang Intel yang hanya menyediakan prosesor Pentium III berkekuatan 733 Mhz.

Memang masih menjadi pertanyaan dan perdebatan, apakah chipset khusus seperti buatan nVidia ini akan mengambil alih peranan yang selama 20 tahun terakhir ini dikuasai oleh Intel. Dalam wawancara dengan majalah *Wired*, Jen-Hsun Huang sendiri memprediksi kalau mikroprosesor nantinya akan digunakan untuk keperluan lain seperti kecerdasan artifisial *(artificial intelligence)*.

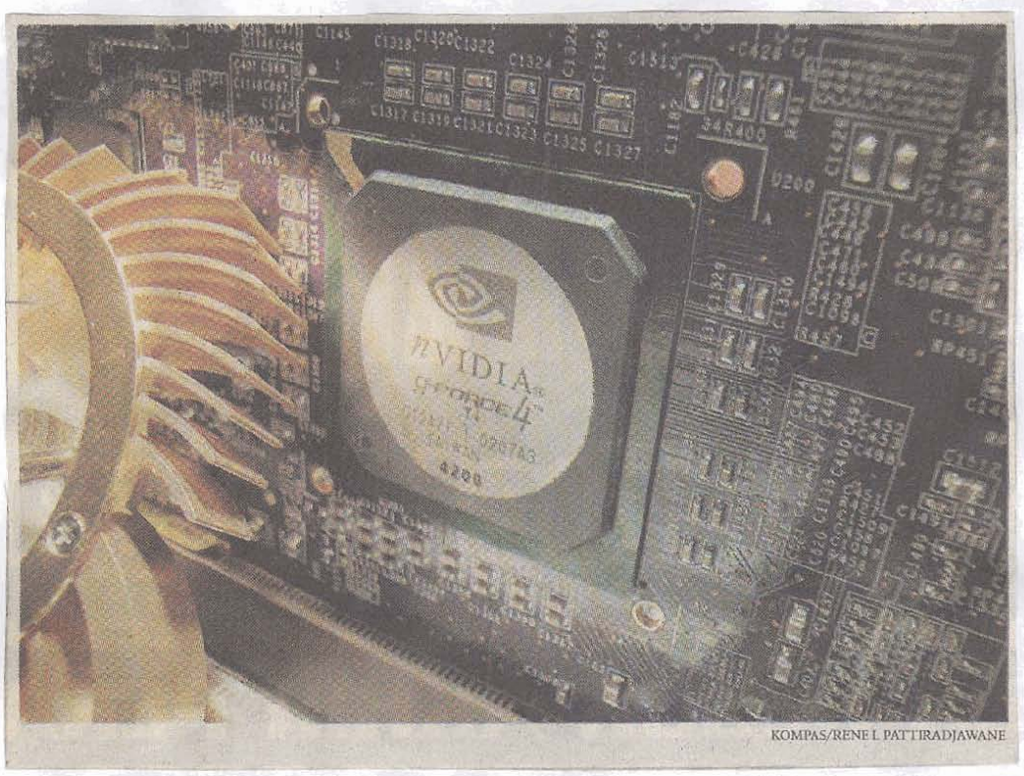
Apa yang akan terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini akan mengubah masa depan, termasuk masa depan Intel sendiri. Perhatikan saja beberapa perusahaan teknologi yang sebelumnya menjadi pemimpin, akhirnya sekarang tidak terdengar sama sekali seperti Cirrus Logic, 3dfx Interative, Pseng Labs, s3, dan sejenisnya. Dan, yang menarik, semua teknologi baru yang akan menjadi pemimpin dunia ini berasal dari Asia, baik itu di Taiwan maupun RRC.

(RENE L PATTIRADJAWANE).

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE



KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 10 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 36 / 1-4
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / KLASS : IKAPI - PENERBITAN PEMERINTAH / 025:19

Ikapi dalam Tuntunan Zaman

1950-1959, Tumbuh dan Berkembang

Lima tahun setelah kemerdekaan, 17 Mei 1950, beberapa pengusaha penerbitan, yaitu Sutan Takdir Alisjahbana, Jusuf Ahmad, dan Nyonya A Notosoetardjo berinisiatif membentuk wadah. Motivasinya, mereka tidak ingin terpinggirkan oleh percaturan di dunia usaha penerbitan yang kala itu didominasi oleh pengusaha keturunan Belanda dan Cina. Lahirlah Ikapi di Jakarta dengan anggota 13 penerbit. Sebagai ketuanya, terpilihlah Achmad Notosoetardjo, pemilik penerbitan dan percetakan CV Endang.

Pada periode Achmad ini, kemajuan organisasi diraih. Cabang pertama diresmikan pada tahun 1953 di Sumatera Utara. Setahun kemudian menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Masa kepemimpinannya, Ikapi berhasil melaksanakan pameran buku untuk pertama kali di Jakarta, April 1954. Inilah cikal bakal tradisi pameran buku. Bahkan, pada tahun 1956, mereka juga berhasil mengadakan pameran buku di Malaysia dan Singapura. Tak kurang 10.000 judul buku dipamerkan di kedua negeri itu.

1959-1963, Legalitas Tercapai

Aspek legalitas organisasi muncul pada periode ini. Akta pertama Ikapi diterbitkan pada 19 April 1961 pada masa kepemimpinan Hazil Tanzil. Pada periode ini pula digelar Kongres Kilat di Bandung untuk mengatasi masalah mendasar seperti hiperinflasi dan sanering mata uang akibat perubahan format politik pemerintah dengan manipol/USDEK-nya.

1963-1968, Kesulitan Mendera

Periode ini merupakan periode buruk. Sesuai dengan kondisi politik di era demokrasi terpimpin, Ikapi diwajibkan menjadi OPS (Organisasi Perusahaan Sejenis). Namanya pun berubah menjadi Ikapi-OPS Penerbitan (23 November 1964). Kemandirian dan otoritas organisasi yang selama ini tetap terjaga, pada masa ini pun telah diambil negara di bawah Departemen Penerangan.

Dua tahun kemudian, masa sulit kembali menghinggapi organisasi ini setelah tumbangnya Presiden Soekarno. Soal naiknya bahan baku buku, ketidakadilan pembagian jatah kertas bagi anggotanya sampai pada langkanya stok kertas sempat menghinggapi organisasi ini. Meskipun demikian, di era kepemimpinan M Hoetaoeroek ini pun berhasil membuahkan Kode Etik organisasi (1964) yang mengatur hubungan bisnis yang sehat antara penerbit dan pengarang, termasuk penerjemah dan ilustrator.

1968-1973, Kembali Terpuruk

Periode sulit masih mendera. Jika sebelumnya pemerintah memberi jatah kertas, pada masa ini jatah itu telah dicabut. Situasi ini diperparah dengan adanya "paket buku" yang dijalankan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan inilah yang menjadikan pemerintah bukan lagi konsumen melainkan ikut menjadi produsen buku, sehingga membuat beberapa penerbit buku sekolah gulung tikar. Jumlah anggota yang pernah mencapai 434 penerbit, akhirnya tinggal 25 persennya saja. Terlepas dari masa suram ini, Ikapi yang dinahkodai Machmoed masih berusaha untuk tetap mengirimkan delegasinya di Pameran Buku Frankfurt (1971).

1973-1979, Tanda Kecerahan Muncul

Kondisi agak membaik tatkala Ajip Rosidi memimpin. Persoalan internal dari utang organisasi sampai tunggakan iuran anggota mulai terbenahi. Demikian pula hubungannya dengan pemerintahan Orde Baru mulai membaik. Apalagi kemunculan Proyek Penyediaan Buku Sekolah Dasar yang biasa disebut proyek Inpres (Nomor 10 Tahun 1973). Kehadiran proyek inilah yang mengakibatkan jumlah buku meningkat pesat. Penerbit baru bermunculan.

1979-1983, Masa Penuh Ketegangan

Kepercayaan pemerintah terhadap Ikapi semakin kuat, tatkala Presiden Soeharto sendiri menyatakan organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi penerbit yang dapat diandalkan. Meskipun hubungan keduanya mesra, tetapi Ismid Hadad, Ketua waktu itu tetap mengeluarkan kritik tajam ke pemerintah soal ketidakjelasan kebijakan perbukuan nasional. Kritik ini pun berujung pada keretakan hubungan Ismid Hadad dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang secara langsung mempengaruhi gerak organisasi ini.

1983-1988, Beban Pajak Bertambah

Harga kertas melonjak kembali. Lagi-lagi Ikapi meminta pemerintah untuk turun tangan. Akhirnya, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perdagangan Rachmat Saleh tertanggal 10 Juli 1984 yang mematok harga kertas dan menjaga kestabilan harga tersebut. Namun, beban kembali menimpa penerbit akibat dikeluarkan kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen mulai 1 April 1985 pada produk buku. Dampaknya jelas, harga buku pun naik 10-15 persen dan angka penjualan buku menurun.

1988-1998, Lagi-lagi Malapetaka

Mulai 1 April 1990 pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan penyerahan buku pelajaran umum, pelajaran agama, dan kitab suci. Ikapi pun bereaksi dengan menurunkan harga jual buku 10 persen. Tetapi, penerbit pun masih ditimpa beban, dengan menurunnya dana Inpres pembelian buku.

Beban krisis ekonomi sejak tahun 1997 mulai terasakan. Harga kertas koran naik sampai 250 persen. Akibatnya, banyak penerbit gulung tikar. Di Jawa Timur, sekitar 70 persen anggota Ikapi menutup usahanya. Meskipun krisis melanda, Ikapi melahirkan Yayasan Adikarya Ikapi untuk memberikan bantuan dan penghargaan penerbit. Upaya ini dilakukan sejak tahun 1997 bekerja sama dengan The Ford Foundation.

1998-2002, Terimbas Reformasi

Ditengah gerakan reformasi yang sedang melanda negeri ini, Ikapi pun membuahkan Konsep Reformasi Perbukuan Nasional tentang Dewan Buku Nasional. Konsep ini pun akhirnya disetujui oleh Presiden BJ Habibie pada tahun 1998. Dewan ini bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan perbukuan nasional. Belum terdengar manfaat dari upaya ini.

(KRI/LITBANG KOMPAS)


PERSEBARAN ANGGOTA IKAPI
Jumlah Anggota di Cabang/Perwakilan
Jumlah lebih dari 5
Jumlah kurang/sama dengan 5
Banda Aceh
Sumatera Utara
Pekanbaru
35
Jambi
Samarinda
Pontianak
Sumatera Barat
Banjarmasin
Palembang
Jakarta
Makassar
Jawa Tengah
186
76
Jawa Timur
Bandarlampung
104
Ende
98
44
Jawa Barat
Yogyakarta
Kupang
Mataram
Denpasar
SUSY

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : 070 Undang-Undang Pers / 070

Lembaga Penyiaran Juga Tunduk pada UU Pers

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga penyiaran (televisi dan radio) tidak hanya harus tunduk pada Undang-undang (UU) tentang Penyiaran—kini Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—melainkan juga harus tunduk pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena, lembaga penyiaran pun bisa melakukan kegiatan jurnalistik yang diatur dengan UU Pers.

Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyiaran yang dipimpin Wakil Ketua Pansus DPR Soeharsojo, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif mengusulkan supaya dalam RUU ditegaskan wartawan yang bekerja pada lembaga penyiaran tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, usulan itu tak didukung oleh sejumlah anggota Pansus RUU Penyiaran.

Pasal 29 RUU Penyiaran menyebutkan, "*dalam melaksanakan tugas jurnalistik, lembaga penyiaran tunduk pada undang-undang ini dan undang-undang tentang pers.*" "Jadi, yang tunduk pada UU Pers bukan wartawannya, tetapi lembaga penyiaran. Karena, yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan lembaga penyiaran bukan wartawan, tetapi lembaga itu," jelas Bambang Sadono, anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG).

Bambang dan Yosef Umarhadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) pun menandaskan, Kode Etik Jurnalistik tidak perlu dicantumkan dalam UU Penyiaran. Karena, kode etik buatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), misalnya, tidak bisa diberlakukan kepada wartawan yang bukan anggota PWI. Lebih baik diungkapkan saja lembaga penyiaran harus tunduk pada UU Pers.

Anggota Pansus RUU Penyiaran, Bahrum, mengingatkan, yang terkena kewajiban mengikuti ketentuan UU Pers memang harus lembaga penyiaran dan bukan perorangan. "Setiap lembaga penyiaran mempunyai kebijakan soal pemberitaannya, termasuk memiliki Dewan Redaksi. Bila hanya wartawannya yang tunduk pada UU Pers, Dewan Redaksi-nya nanti bisa lepas tanggung jawab," ingatnya lagi. (TRA)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 6 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : TRI
No_Klass/Subjek : 070 / UU Pers

Jadi Pilar Demokrasi, Pers Tuntut Budaya Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia menuntut adanya hukum yang melarang kekuasaan pemerintahan menjadi penentu nasib pers atau bisa mengurangi kebebasan pers. Berkaitan dengan kondisi itu, harus pula dilarang oleh hukum adanya kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain yang bertindak sebagai kekuasaan yudikatif atau menentukan salah atau tidaknya pemberitaan pers.

"Dengan demikian, realisasi pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia menuntut adanya budaya hukum dari komponen bangsa, terutama dari mereka yang sedang berkuasa. Siapa yang harus memulai dan dari mana melaksanakan budaya itu, utamanya penegak hukum, ya jaksa, *lawyer*," kata hakim agung Artidjo Alkostar dalam *workshop* "Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi" yang diadakan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta-Dewan Pers-Friedrich Ebert Stiftung Jakarta, Kamis (10/10) di Jakarta.

Di Indonesia, lanjutnya, penegakan hukum itulah yang tak pernah tergarap. Penyebabnya, selain aturannya masih mengacu pada hukum kolonial, proses pembuatan hukumnya masih memiliki kelemahan di substansi, budaya, dan struktur hukum.

Menurut Artidjo, realisasi itu merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari pers yang berhak mengkritik pemerintah dan institusi kekuasaan negara yang lain. Di samping itu, pers juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat demokrasi dengan memberikan informasi secara layak kepada publik serta merespons kebutuhan dan keinginan masyarakat. Landasannya adalah Pasal 28E dan 28F UUD 1945 hasil amandemen.

Ditambahkan, eksistensi pers sebagai pilar demokrasi juga merupakan kebutuhan rohani masyarakat dalam memenuhi realisasi yang disebut *total justice*. "Selama ini masyarakat hanya menelan *formal justice* dalam proses hukum di pengadilan, namun di luar itu pemberitaan pers telah memberikan *total justice* kepada masyarakat," tuturnya. Maksudnya, kebutuhan batin akan rasa haus keadilan masyarakat sudah dipenuhi oleh pers. "Minimal dengan diberitakan, orang yang bersangkutan tidak bisa tidur," kata Artidjo lagi. (TRI)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 5 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : UNDANG-UNDANG PERS / 070

Keperluan Mengubah Undang-Undang No 40/1999

◆ Perspektif Kerakyatan

[illegible] HAMAD

MENGAPA terjadi pro-kontra perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999? Benarkah UU yang dihasilkan dalam situasi reformasi itu terlalu bebas dari sudut pandang politik? Atau, justru membatasi pertumbuhan pers dari segi lain, dari sisi keusahaan media?

Sebagaimana diketahui, ide merevisi UU No 40/1999 muncul dalam Rapat Kerja antara Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dengan Komisi I DPR pada 6 Desember 2001. Beberapa anggota Dewan menyatakan UU ini tidak berhasil menjaga pers dari kebablasannya, sehingga menimbulkan ekses-ekses negatif, termasuk terlalu berani mengkritik pemerintah dan mengumbar pornografi.

Inisiatif itu segera mendapat tanggapan terutama dari komunitas pers sendiri, yang umumnya menolak ide revisi itu. Leo Batubara, tokoh pers, berargumentasi, revisi hanya akan mengembalikan kesewenangan pemerintah dalam mengawasi pers. (*Kompas*, 3/5/2002) Demo penentangan terhadap revisi UU juga dilakukan sejumlah praktisi pers pada Hari Pers Sedunia (3/5/2002) di depan Istana Merdeka.

Sebenarnya kita perlu curiga dengan penentangan terhadap revisi UU ini; tetapi bukan dari sudut pandang kekuasaan, melainkan dari aspek keusahaan pers. Benarkah aksi kontrarevisi itu murni kebebasan informasi atau ada muatan kepentingan ekonomi?

Isi UU No 40/1999?

Sejak zaman kemerdekaan UU Pokok Pers sudah mengalami tiga kali perubahan. Dari UU No 11/1966 menjadi UU No 21/1982, dan terakhir UU No 40/1999. Apa yang membedakan antara ketiga UU ini? Pertama-tama secara *face validity* kita dapat melihat perbedaan ketiganya dari istilah yang digunakan **(lihat tabel).**

Dari tema yang dipakai, ternyata UU No 4/1966 dan UU No 21/1982 sarat dengan tugas kenegaraan (baca: kekuasaan), sehingga dapat dipahami jika selama ini pers Indonesia banyak dibebani pesan-pesan pemerintah. Sebaliknya, UU No 40/1999 penuh tugas kerakyatan. Pers menjadi lebih terbuka, termasuk dalam mengkritik pemerintah. Jadi, dengan adanya UU No 40/1999 itu, pers kita berpindah posisi dan peranan, dari menjalankan supremasi negara *(state)* menjadi pelaksana supremasi rakyat *(people)*.

Tidak mengherankan bila hal demikian terjadi. Rupanya berlaku dalil, UU itu mencerminkan semangat zamannya. Romantika revolusi tampaknya masih mengalir kuat dalam UU No 4/1966. Sementara, UU No 21/1982 sangat menonjolkan semangat "pembangunan" yang diagung-agungkan rezim Orde Baru (Orba). Dalam UU No 40/1999 amat terasa semangat kemerdekaan pers sesuai gerakan reformasi menen-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

tang pembelengguan pers yang dilakukan rezim Orba hampir seperempat abad (1974 - 1998).

Membela rakyat?

Selain memiliki wacana, UU itu juga mempunyai tuntunan praktis. Ada dua aspek yang diatur dalam UU tentang Pers.

Pertama, aturan yang berkaitan dengan isi *(code of publication)*. Persoalan kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam kode ini. Kedua, aturan yang berhubungan dengan perusahaan pers *(code of enterprise)*.

Agak sedikit berbeda dari dua UU sebelumnya, dalam UU No 40/1999 aspek (pasal/ayat) yang mengatur bidang perusahaan pers memperoleh porsi lebih besar. Dalam Bab I Pasal 1, sekurang-kurangnya ada lima ayat yang berkenaan dengan perusahaan pers (Ayat 2, 3, 5, 6, dan 7). Pasal 3 Ayat (2) juga menyebut pers sebagai lembaga ekonomi.

Porsi pengaturan perusahaan pers juga tampak dalam Bab IV. Ada enam pasal yang berkaitan dengan itu, ditambah Bab VI (1 pasal tentang perusahaan pers asing), Bab VIII, Pasal 18 Ayat (2) dan (3), serta Bab IX Pasal 19 Ayat (2). Bandingkan pengaturan masalah ini dengan aspek substansi (kemerdekaan pers) yang diatur dalam Bab II (lima pasal), ditambah Bab VIII Pasal 18 Ayat (1), dan Bab IX Pasal 19 Ayat (1).

Dari situ tampak, UU No 40/1999 dapat dibaca lebih berorientasi pada aspek ekonomi. Berarti lebih berpihak pada pemodal. Bila sudah bicara modal, lazimnya cenderung pada keuntungan. Jadi, dalam perusahaan pers, informasi tiada lain adalah komoditas yang sekadar untuk diperjualbelikan.

Dalam situasi dan alam pikiran seperti itu, boleh jadi ihwal "hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, supremasi hukum masyarakat" dalam arti sejatinya, terabaikan. Dalam pers industri, belum tentu berita yang dimuat benar-benar merupakan hal yang diperlukan masyarakat; sebaliknya berita itu adalah hal yang ingin dijual media.

Dari jurusan ini, UU No 40/1999 adalah momentum yang menyempurnakan mekanisme SIUPP. Alasannya, sejak berlaku pengaturan SIUPP (Pasal 13 Ayat (5) dan (6) UU No 21/1982) telah memunculkan fenomena kelompok-kelompok usaha media karena kemampuannya membeli SIUPP. Di luar ancaman pencabutan sebagaimana diatur dalam Permenpen No 1/1984 yang kontroversial itu, mekanisme SIUPP ternyata telah mengubah pers kita dari pers perjuangan ke pers industri. Dunia pers tak lagi melahirkan pejuang-pejuang pers, tetapi pers mencetak pengusaha-pengusaha media.

Di antara sejumlah kritisi, Robert MC Chesney (1998) menegaskan, pers yang telah menjadi industri (konglomerasi media) mengancam demokratisasi. Pers yang telah menjadi mesin kapital bisa mengorbankan kepentingan orang banyak. Suara yang cenderung dibesarkan media industri adalah yang menguntungkan industri mereka. Sebaliknya, massa kebanyakan tak lebih sebagai sasaran pasar media. Keberagaman pendapat dalam konglomerasi media bisa-bisa hanya sebagai slogan saja.

Visi pers kerakyatan

Untuk kepentingan usaha media, UU No 40/1999 jelas amat menguntungkan. Apalagi bagi pemain lama, mereka mendapat dua keuntungan dengan UU ini.

Ketika masih berlaku mekanisme SIUPP dengan modal amat memadai, mereka membeli sejumlah SIUPP dan mengembangkan usaha medianya dengan baik. Dengan adanya UU No 40/1999, yang di satu sisi amat berpihak pada pengusaha dan di sisi lain menjamin tidak akan ada pihak mana pun yang menghalangi kemerdekaan pers (Pasal 18 Ayat 1), maka sentosalah usaha media mereka.

Bila cara-cara seperti ini masih akan dipertahankan, tentu amat merugikan masyarakat kebanyakan karena mereka amat rentan dengan modal usaha. Ketentuan penerbitan pers yang selalu harus berbadan usaha, bukan saja bisa membenarkan pendapat bahwa pers kita baru saja keluar dari mulut harimau (penguasa) dan mulai masuk ke mulut buaya (pengusaha), tetapi secara substantif dan praktis tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Ditambah ketentuan "pers harus berbadan usaha", sebetulnya tidak sejalan dengan peraturan di atasnya (UUD 1945 Pasal 28), maka UU No 40/1999 perlu diubah. Dalam Pasal 28 itu, belum tentu yang dimaksud dengan "kebebasan menyatakan pendapat diatur oleh undang-undang" harus ada wujudnya sebagai badan usaha. Bisa saja berbentuk yayasan, paguyuban, atau komunitas, yang penting jujur dan bertanggung jawab, baik secara moral maupun hukum. Sayang, sejak UU No 4/1966, UU No 21/1982 hingga UU No 40/1999, istilah perusahaan pers sebagai penjabaran pasal 28 tetap dipertahankan.

Atas dasar itu maka UU No 40/1999 harus diubah dengan wacana bukan sekadar ingin bebas dari *(free from)* sejumlah aturan penguasa (pemerintah), tetapi harus dipikirkan mengenai kebebasan untuk *(free for)* sebanyak-banyak kepentingan rakyat. Wacana dan tuntutan praktis UU itu kelak harus mencerminkan demokratisasi dari segi akses mengelola dan mendapatkan informasi.

IBNU HAMAD
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, mengajar mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia.

PERBANDINGAN PENGGUNAAN ISTILAH DALAM UU PERS

No	UU No 11/1966	UU No 21/1982	UU No 40/1999
1	**Alat revolusi**	Alat perjuangan nasional	Lembaga sosial, lembaga ekonomi
2	**Alat penggerak massa**	Alat penggerakan pembangunan bangsa	Wahana komunikasi massa
3	**Pengawal revolusi**	Pengawal ideologi Pancasila	Media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
4	**Pers sosialis Pancasila**	Pers Pancasila	Pers nasional, pers asing
5	**Tiga kerangka revolusi**	Tujuan nasional	Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,menegak-kan nilai-nilai demokrasi, HAM, supremasi hukum
6	**Progresif**	Konstruktif progresif	Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
7	**Kontra revolusi**	Menentang Pancasila	Menghambat atau meng-halangi kemerdekaan pers
8	**Berkhianat terhadap revolusi**	Berkhianat terhadap perjuangan nasional	
9	**Gotong royong atas asas kekeluargaan**	Secara bersama atas asas kekeluargaan	Peran serta masyarakat
10	**Revolusi**	Perjuangan nasional	Kemerdekaan pers
11	**Revolusi Pancasila**	Ideologi Pancasila	

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Kamis / 17 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 8 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : JURNALISTIK / 070.1

TVRI Jangan Sampai Jadi Alat Kepentingan Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS — Televisi Republik Indonesia sebagai TV publik harus benar-benar netral dan bebas dari kepentingan politik kelompok mana pun. Oleh karena itu, masuknya Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Letjen (Purn) Budi Harsono dalam jajaran komisaris baru TVRI harus dijelaskan kepada publik. Sebab, dikhawatirkan TVRI bisa dijadikan alat untuk kepentingan partai politik, terutama menjelang Pemilihan Umum 2004.

"TVRI harus diupayakan jangan sampai jadi alat kepentingan kampanye parpol tertentu," kata Djoko Susilo, Ketua Sub-Komisi Komunikasi dan Informasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu (16/4).

Hari Selasa lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengumumkan perubahan status TVRI dari perusahaan jawatan (perjan) menjadi perseroan terbatas (PT). Selain itu, juga diumumkan jajaran komisaris dan direksi baru TVRI.

Di jajaran komisaris, nama Budi Harsono muncul bersama Gede Widiatyana Merati, Pandu Jayanto, Darmabakti, dan Indra Djati Sidi. Adapun Komisaris Utama TVRI dijabat Abdullah Hudiono Dimas Wahab.

Budi Harsono, yang ditemui di Gedung MPR/DPR, kemarin, menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai komisaris lebih bersifat individual dan tidak ada misi khusus dari Partai Golkar. Ia juga berjanji akan bersikap profesional untuk membedakan kapan menjadi Sekjen DPP Partai Golkar dan kapan menjadi Komisaris TVRI.

"Kekhawatiran itu terlalu jauh," kata Budi.

Koalisi PDI-P dan Golkar

Djoko Susilo menilai, nuansa politik di balik perubahan komisaris dan direksi TVRI sangat kental, mengingat sejumlah komisaris dan direksi berafiliasi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apalagi salah seorang Sekjen DPP Partai Golkar Budi Harsono juga menjadi salah seorang komisaris.

"Pak Budi Harsono orangnya baik, tetapi saya mencium ini semacam upaya Menteri BUMN Laksamana Sukardi—yang adalah mantan Bendahara DPP PDI-P—untuk berkoalisi dengan Partai Golkar menjelang pemilihan presiden 2004," kata Djoko, Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR, gabungan antara Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arief Mudatsir Mandan juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Dengan masuknya Sekjen DPP Partai Golkar di jajaran komisaris TVRI, kata dia, jelas akan sulit dibedakan secara profesional apakah dia elite Partai Golkar dan Komisaris TVRI.

"Menteri BUMN harus menjelaskan kepada publik alasan penunjukan Budi Harsono, karena ini juga menyangkut penggunaan fasilitas negara oleh partai politik," katanya.

Namun, anggota Komisi I dari F-PDIP Paulus Widiyanto tidak melihat adanya upaya partai politik mana pun—termasuk PDI-P dan Partai Golkar—untuk menggunakan TVRI sebagai alat kampanye, sepanjang aturannya jelas. Rujukan mengenai kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Selain itu, pengaturan tentang TV publik juga telah jelas, yakni dalam UU No 32/2002 tentang Penyiaran.

Sementara itu, Direktur Center for Electoral Reform (Cetro) Smita Notosusanto mengingat perlunya disusun peraturan kampanye yang lebih ketat dan terperinci. Aturan ini diperlukan agar media elektronik tidak dikuasai oleh partai-partai yang memiliki dana besar semata.

"Masa kampanye presiden dan wakil presiden dalam pemilu singkat. Karena itu, seluruh peserta pemilihan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar akan memanfaatkan media elektronik sebagai media kampanye yang efektif," kata Smita, kemarin, saat diterima Wakil Sekretaris F-PPP Chozin Chumaidy di Gedung DPR/MPR.

Salah satu yang diusulkan Smita adalah adanya pembagian masa jam tayang yang adil kepada semua calon dalam masa kampanye. "Kalau tidak diatur, hanya partai yang punya uang saja yang bisa menguasai media elektronik," ujarnya.

Deputi Cetro Hadar N Gumay juga mengusulkan agar undang-undang pun mengatur pemberian sanksi kepada media yang bersikap tidak adil.

(BUR/SUT)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Selasa / 15 / April / 2003
Hlm/Kolom : 29 / 1 2-5
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / 150 . CLASS : JURNALISTIK / 070.1

Tanpa Suntikan Dana

TVRI Bandung Hanya Bertahan Hingga Mei 2003

BANDUNG, KOMPAS — Menyusul Televisi Republik Indonesia (TVRI) Medan dan Padang yang terancam berhenti siaran, kini TVRI Bandung juga mengalami hal yang sama.

Manager TVRI Stasiun Bandung H Hasan Hariri mengatakan, dengan kondisi keuangan TVRI saat ini, pihaknya hanya dapat bertahan hingga Mei 2003. Selepas itu, tanpa ada bantuan dana dari pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, TVRI Bandung tidak akan bisa siaran.

Kondisi TVRI Bandung yang memprihatinkan ini disampaikan Hasan dalam dialog "TVRI Bandung, Quo Vadis" yang diselenggarakan di Bandung, Senin (14/4). Menurut Hasan, sejak dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk TVRI Bandung dihentikan mulai Januari 2003, kondisi keuangan TVRI kembang kempis.

"Biasanya pemerintah memberikan dana Rp 8 miliar per tahun yang dibagi menjadi dua pos, yakni gaji karyawan dan biaya operasional. Sejak Januari 2003, pemerintah hanya membiayai gaji karyawan. Akibatnya, kami tidak mampu membiayai operasional TVRI Bandung," kata Hasan.

Menurut Hasan, keputusan pemerintah untuk menghentikan dana bagi TVRI karena keberadaan TVRI sudah dianggap sebagai persero. Padahal, status TVRI hingga saat ini masih belum jelas karena belum ada aturan mengenai bentuk dan kerja persero itu sendiri.

Dia menambahkan, kondisi keuangan TVRI Bandung yang sangat terbatas sehingga TVRI Bandung menunggak tagihan listrik bulan Januari–Maret 2003 sebesar Rp 215 juta.

"Kami terpaksa menunggak bayar listrik. Kamis kemarin petugas PLN datang ingin memutus aliran listrik. Akhirnya kami mengundang Direktur PLN wilayah Jawa Bali untuk hadir dalam sebuah acara di TVRI Bandung. Hal itu semata-mata agar mereka mengerti kondisi kami," kata Hasan.

Sejak anggaran untuk TVRI dihentikan, Hasan mengaku pihaknya harus mencari dana sendiri untuk membiayai operasional TVRI Bandung. Caranya, bekerja sama dengan biro iklan dan pemerintah daerah untuk memasang iklan di TVRI Bandung. Perolehan iklan setiap bulannya, kata Hasan, sebesar Rp 150 juta. Padahal, setiap bulan TVRI Bandung membutuhkan dana tak kurang dari Rp 480 juta.

Kekurangan tersebut ditutupi dari keuntungan TVRI tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena keuntungan tahun sebelumnya hanya Rp 1 miliar, maka dana yang tersisa hanya cukup untuk membiayai operasional TVRI hingga bulan Mei 2003 ini.

"Jika tidak ada bantuan dari pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, kami khawatir hanya bisa bertahan hingga bulan Mei 2003," kata Hasan.

Sebenarnya, kata Hasan, dia sudah mengurangi jam siaran dari 20 jam per hari menjadi tujuh jam per hari. Kini yang ditayangkan hanya siaran TVRI daerah, tanpa merelai siaran TVRI pusat.

Akan tetapi, menurut Hasan, keputusan tersebut membuat sekitar 30 juta pemirsa TVRI di seluruh Jawa Barat kehilangan hak memperoleh informasi dari TVRI. Padahal, informasi yang sampai kepada masyarakat tidak boleh dibatasi.

Menanggapi masalah yang dihadapi TVRI Bandung tersebut, sejumlah tokoh masyarakat yang peduli akan kelangsungan TVRI Bandung membentuk Tim Peduli TVRI Bandung.

"Seharusnya TVRI jangan sembunyi-sembunyi lagi menampilkan iklan di TV. Bisnis itu biasanya jelas, tidak sembunyi-sembunyi," kata Ketua Badan Pendiri Forum Kajian Budaya Lokal Koen Soekarno.

Menanggapi hal tersebut, Hasan meminta kejelasan mengenai status TVRI Bandung ke pimpinannya di Jakarta. (Bu)